



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dody Hanggodo
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua


DODY HANGGODO

Pihak Pertama


MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	
1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	80,57%
2. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	79,15%

Program:
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 90.908.008.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM


BODY HANGGODO

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya		
1.	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	80,57%	<p>Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat Jenderal dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan yang dihitung melalui rerata Nilai Pengelolaan Kearsipan Seluruh Unit Kerja; 2. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Pengelolaan BMN yang dihitung melalui rerata dari Kegiatan Penatausahaan, Perencanaan, Penggunaan, Pengawasan Dan Pengendalian BMN; 3. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum yang dihitung melalui rerata dari Kegiatan Efektifitas Penyelesaian Produk Hukum, Penyusunan Perjanjian, Penyusunan Pertimbangan Hukum, Dan Advokasi Hukum; 4. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana yang dihitung berdasarkan Tingkat Layanan Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu Berdasarkan Hasil Survey; 5. Sepuluh Persen (10%) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dihitung melalui Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian (IKPA). Nilai berdasarkan aplikasi SMART DJA; 6. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI yang dihitung berdasarkan Jumlah Rekomendasi atas Temuan BPK RI yang Sudah Tuntas Ditindaklanjuti terhadap Total Jumlah Rekomendasi yang Ditampilkan Di SIPTL BPK-RI; 7. Sepuluh Persen (10%) Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Organisasi oleh Inspektorat Jenderal; 8. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik yang dihitung melalui Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Publik Berupa Persepsi/Sentimen Positif Stakeholder Dan/Atau Stakeholder Feedback;

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
			9. Sepuluh Persen (10%) Nilai Transformasi Digital Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital; 10. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui rerata dengan bobot dari Kegiatan Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern, Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern, dan Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern.
2.	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	79,15%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan tugas pengawasan pada Inspektorat Jenderal dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang dinilai melalui Level Internal Audit Capability Model (IACM) yang merupakan hasil self assesment (penilaian mandiri) oleh tim internal Inspektorat Jenderal, dan/atau hasil evaluasi BPKP; 2. Lima Belas Persen (15%) Indeks Integritas Kementerian PU yang diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 3. Lima Belas Persen (15%) Tingkat Pembangunan Zona Integritas yang menggunakan kumulatif Unit Kerja yang mendapat Predikat menuju WBK dan/atau WBBM dari Tim Penilai Nasional; 4. Lima Puluh Persen (50%) Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan, yang dihitung dari rata-rata capaian IKK Inspektorat I – VI.

Jakarta, 29 Desember 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DODY HANGGODO

INSPEKTUR JENDERAL



MAULIDYA INDAH JUNICA